

# **LAPORAN KINERJA**

## **TRIWULAN II**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN**

**Jl. Letkol Slamet Wardoyo 43-45, Citrodiwangsan Telp. (0334) 881606**

**L U M A J A N G**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan informasi Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, yang di dalamnya berisi gambaran capaian kinerja selama kurun waktu satu bulan dan menjabarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang ini disusun. Semoga dapat memberikan manfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja.

Lumajang, Juli 2022

KEPALA DINAS

KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN



**Drs. SUHARWOKO, M.Si**

NIP. 19621215 199403 1 006



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	3
A. LATAR BELAKANG .....	3
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
C. GAMBARAN UMUM .....	5
D. DASAR HUKUM.....	8
E. SISTEMATIKA.....	10
BAB I PENDAHULUAN.....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	14
A. CAPAIAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	18
B. REALISASI ANGGARAN .....	60
BAB IV P E N U T U P.....	77



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mempercepat diadakan reformasi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Hal ini juga didukung dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berfungsi untuk mengetahui



kemampuannya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang Perdagangan dan Perindustrian yang mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dibidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban tentang hasil kegiatan atau pelaksanaan pembangunan Perdagangan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan II Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penjabaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan II Tahun 2022 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

- a) Menjadi motivasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Menjadikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sebagai Instansi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis;
- c) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan



beserta jaringannya guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;

- d) Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
- e) Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif – efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

### **C. GAMBARAN UMUM**

#### **a. Organisasi Perangkat Daerah**

Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lumajang No. 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan. Dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, perindustrian dan perdagangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

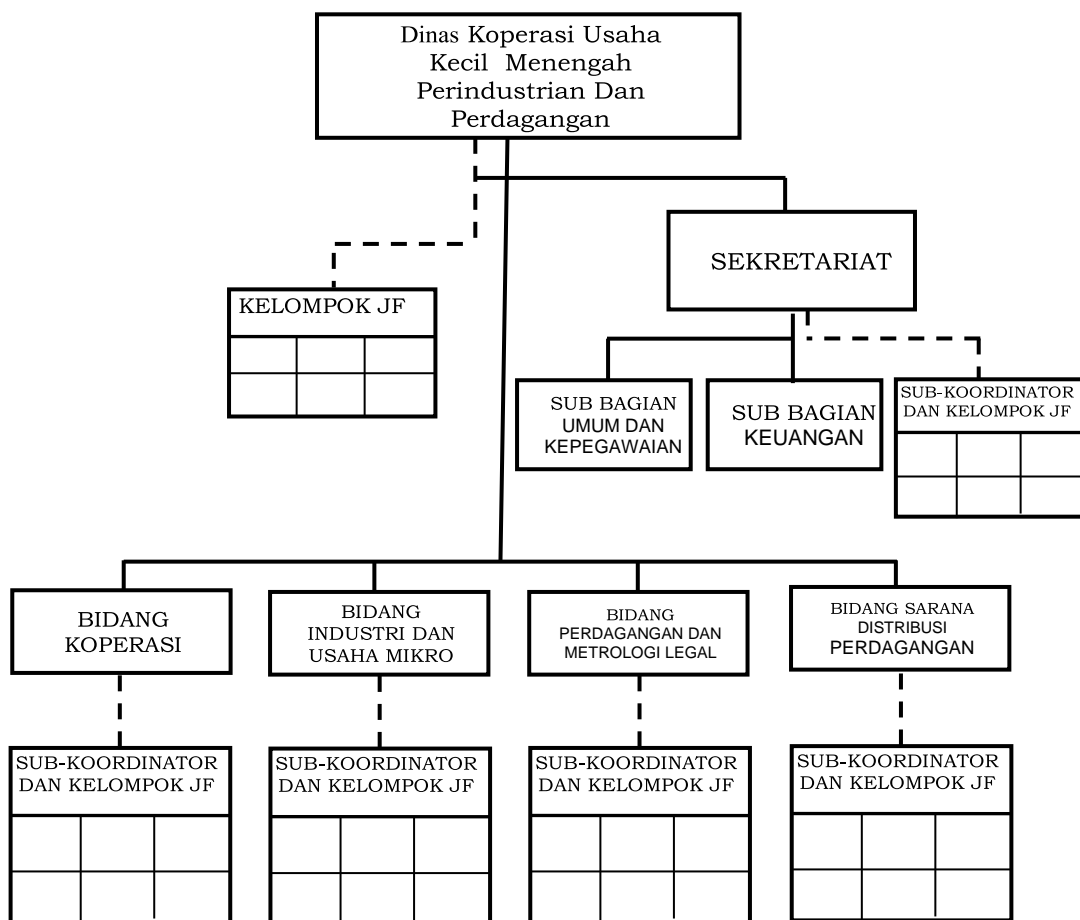
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Di samping itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta sarana distribusi perdagangan;
- b) pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta sarana distribusi perdagangan;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta

- sarana distribusi perdagangan;
- d) pelaksanaan administrasi bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta sarana distribusi perdagangan;
  - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang No. 11 Tahun 2022 :

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

#### b. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 269 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 86 orang, Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 178 orang, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebanyak 3 orang, dan Petugas Pendamping Koperasi sebanyak 2 orang



Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PNS dan TKK Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Juni 2022**

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian				Jumlah	%
		PNS	TKK	PPKL	Pendamping		
1.	SD	2	7			9	3
2.	SMP	2	17			19	7
3.	SMA/SMK	51	155			166	62
4.	D1	-	-			0	0
5.	D2	-	-			0	0
6.	D3	2	2			4	1
7.	D4/S1	23	37	3	2	65	24
8.	S2	6	-			6	2
<b>J U M L A H</b>		<b>86</b>	<b>178</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>269</b>	<b>100</b>

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang proporsi paling banyak adalah lulusan SMA/SMK sebanyak (62%) diikuti D4/S1 (24%), SMP (7%), SD (3%), S2 (2%), D3 (1%) dan yang paling kecil D1 dan D2 (0%).

Jumlah pegawai per unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang per Juni 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Per Unit Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Per Juni 2022**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sekretariat	35	
2	Bidang Perdagangan dan Metrologi Legal	22	
3	Bidang Usaha Mikro dan Industri	14	
4	Bidang Koperasi	13	
5	Bidang Sarpras	185	
	<b>JUMLAH</b>	<b>269</b>	

Dilihat dari Pegawai Per Unit Kerja dapat dijelaskan bahwa





Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang tidak hanya ada di tingkat II (dua) saja akan tetapi juga menyebar di 15 kecamatan yang terdiri 30 pasar.

**c. DASAR HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2022, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada



Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
21. Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja
22. Peraturan Bupati Lumajang No. 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi



serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.

#### **d. SISTEMATIKA**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan II Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Adapun Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan II Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan :

- A. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran berkenaan ;
  2. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan ;



3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
  4. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.;
- B. Realisasi Anggaran pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan indikator dan target sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks Perubahan Renstra. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan.

**Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022 Berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2018 - 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	Rp	187.163.473.963
2. Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	Rp	10.386.052.733.457
3. Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rp	3.354.259.412.080
4. Meningkatnya PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp	4.838.025.215.520
5. Meningkatnya pendapatan perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	Rp	21.843.136,20

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2018-2023

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah,

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang.

Revisi perjanjian kinerja dimungkinkan terjadi, dimana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang terjadi dikarenakan beberapa hal diantaranya:

- a. Adanya revisi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023, sehingga adanya Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) pada pertengahan tahun melalui Perubahan APBD

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	Rp	187.163.473.963
2. Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	Rp	10.386.052.733.457
3. Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rp	3.354.259.412.080
4. Meningkatnya PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp	4.838.025.215.520
5. Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	Rp.	21.843.136,20

Adapun Program, kegiatan dan Sub kegiatan serta anggaran tahun 2022 berdasarkan penetapan Pergeseran II pada tanggal 7 Maret 2022 yaitu Pagu murni dari eks Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Sisa pagu dari eks Dinas Perdagangan sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2022**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI</b>	<b>22.811.838.120</b>
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	9.916.578.270
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	7.591.250
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.330.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.190.000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	871.250
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	7.941.149.970
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.893.035.970
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.330.000
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	4.784.000
1.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	17.756.000
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.756.000
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.000.000
1.4	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	5.000.000
1.4.1	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	5.000.000
1.5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	288.155.570
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.020.090
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.456.330
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.275.550
1.5.4	Penyediaan Bahan / Material	4.560.600
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.843.000
1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1.259.402.280
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.035.000
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	344.612.080
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	911.755.200
1.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	397.523.200
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	277.473.200
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.050.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.7.3	Pemeliharaan Aset tak berwujud	50.000.000
<b>II</b>	<b>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b>	32.400.000
<b>2.1</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	32.400.000
2.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	26.400.000
2.1.2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.000.000
<b>III</b>	<b>Program penilaian kesehatan ksp/usp Koperasi</b>	75.360.000
<b>3.1</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	75.360.000
31.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	52.800.000
3.1.2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	22.560.000
<b>IV</b>	<b>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</b>	404.200.000
<b>4.1</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	404.200.000
4.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	404.200.000
<b>V</b>	<b>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</b>	14.999.850
<b>5.1</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	14.999.850
5.1.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	14.999.850
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG USAHA MIKRO</b>	<b>12.368.300.000</b>
<b>VI</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	12.368.300.000
<b>6.1</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	12.368.300.000
6.1.1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	12.368.300.000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>4.220.262.000</b>





NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	3.682.000.000
<b>7.1</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	2.979.000.000
7.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.655.000.000
7.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.324.000.000
<b>7.2</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	703.000.000
7.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	703.000.000
<b>VIII</b>	<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</b>	37.690.000
<b>8.1</b>	<b>Pengendalian Harga. dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Pasar Kabupaten/ Kota</b>	7.690.000
81.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada PelakuUsaha Distribusi Barangdalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4.090.000
8.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3.600.000
<b>8.2</b>	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsididi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	30.000.000
8.2.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	30.000.000
<b>IX</b>	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	167.000.00
<b>9.1</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	167.000.00
9.1.1	Pameran Dagang Nasional	100.000.000
9.1.2	Pameran Dagang Lokal	50.000.000
9.1.3	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	17.000.000
<b>X</b>	<b>Program standardisasi dan perlindungan konsumen</b>	163.572.000
<b>10.1</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	163.572.000
10.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	146.572.000
10.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	17.000.000
<b>XI</b>	<b>Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</b>	170.000.000
<b>11.1</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	170.000.000
11.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	120.000.000
11.1.2	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	50.000.000



<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>6.602.922.184</b>
<b>XII</b>	<b>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</b>	6.569.008.386
<b>12.1</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	6.569.008.386
12.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	75.000.000
12.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	429.999.600
12.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	27.000.000
12.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6.037.008.786
<b>XIII</b>	<b>Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota</b>	25.433.798
<b>13.1</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	25.433.798
13.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.749.750
13.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	9.684.048
<b>XIV</b>	<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>	8.480.000
<b>14.1</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	8.480.000
14.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	8.480.000
<b>JUMLAH</b>		<b>33.635.022.304</b>



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi *planning* yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari perencanaan yang sudah dibuat. Di akhir kegiatan terdapat fungsi *evaluating* dimana semua melaksanakan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggung jawaban penggunaan seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur. Terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Dalam pertanggung jawaban piranti yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran untuk melihat sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dari perencanaan yang telah dibuat.

##### **a. Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan**

Capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan



tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 ke atas	: Sangat Baik
$70 \leq x < 85$	: Baik
$55 \leq x < 70$	: Cukup Baik
$x < 55$	: Kurang Baik

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor – faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feedback* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian



tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2022. Capaian indikator dan target Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3.1****CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	187.163.47 3.963	Belum dapat diukur (data dari BPS)	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur
2.	Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	10.386.052 .733.457	Belum dapat diukur (data dari BPS)	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur
3.	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	3.354.259. 412.080	Belum dapat diukur (data dari BPS)	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur
4.	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	4.838.025. 215.520	Belum dapat diukur (data dari BPS)	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur
5.	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	21.843.136 ,20	Belum dapat diukur (data dari BPS)	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan II Tahun 2022 (Data diolah)

Adapun Program / Kegiatan / Sub Kegiatan penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan pada Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Indikator Kinerja : Persentase Pemenuhan kebutuhan operasional kantor

Target Kinerja Tahun 2022 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 16%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 27%

Pada program ini melaksanakan program rutin sekretariat yang merupakan pendukung bagi kegiatan teknis di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan. Sehingga total capaian sampai dengan Triwulan II sebesar 43%. Prosentase pencapaian kinerja tersebut sudah sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.



### 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Target Kinerja Tahun 2022 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 38%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 19%

Pada kegiatan ini menghasilkan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala, baik itu triwulan maupun semester, sehingga pada tiap – tiap triwulan melaksanakan penyusunan dokumen yang sama dengan periode yang berbeda. Adapun sampai dengan triwulan II sudah menghasilkan 2 dokumen antara lain penyusunan dokumen P-Renstra 2019 - 2023, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021, Laporan Kinerja (LKj) Triwulan 1, Laporan Kinerja (LKj) Triwulan 2, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan I, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan 2 dan dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022.

#### 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target Kinerja Tahun 2022 : 2 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 2 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 dokumen

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen P-Renstra 2019 - 2023 dan dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022. Akan tetapi penyusunan sudah dilaksanakan pada Triwulan I sehingga realisasi kinerja ada triwulan II 0 dokumen.

#### 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0



Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Triwulan III.

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target Kinerja Tahun 2022 : 5 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 2 laporan

Realisasi Kinerja Tw II 2022: 1 laporan

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2022.

1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target Kinerja Tahun 2022 : 8 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 2 laporan

Realisasi Kinerja Tw II 2022: 2 laporan

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja, Berupa Survey Kepuasan Masyarakat tiap triwulan pada Tahun 2022 dan Evaluasi kinerja triwulan yang tertuang dalam form E - 81.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target Kinerja Tahun 2022 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 25%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 25%

Kegiatan ini melaksanakan penyusunan seluruh dokumen keuangan yang terdiri dari laporan harian, bulanan, triwulan, semester dan tahunan. Dan juga dokumen yang berupa pengajuan SPJ kegiatan rutin dengan perinciannya hingga menjadi SP2D.



### 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Target Kinerja Tahun 2022 : 104 orang / 12 bulan

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 98 orang

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 98 orang

Sub kegiatan ini melaksanakan penyerapan anggaran gaji untuk seluruh ASN yang terdaftar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan termasuk tunjangan tambahan penghasilan pegawai dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

### 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Target Kinerja Tahun 2022 : 12 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 3 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 3 dokumen

Sub kegiatan ini melaksanakan belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan yang terdiri dari pejabat pembuat komitmen dan pengelola keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.

### 1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Target Kinerja Tahun 2022 : 12 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 3 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 3 dokumen





Sub kegiatan ini melaksanakan penatausahaan rutin sub bagian keuangan yaitu proses verifikasi pada dokumen pengajuan SPJ.

### 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah

Target Kinerja Tahun 2022 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 14%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 14%

Pada kegiatan ini melaksanakan fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah yang dilakukan secara berkala, baik triwulan maupun semester.

#### 1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 dokumen

Pada sub kegiatan ini melaksanakan fasilitasi pengamanan Barang Milik Daerah, berupa proses penyertifikatan tanah milik Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan serta pengamanan aset yang sedang dalam sengketa.

#### 1.3.2 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Target Kinerja Tahun 2022 : 4 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 1 laporan

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 1 laporan

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi BMD yang berada di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan



Perdagangan , Kantor Bidang Metrologi Legal serta 30 pasar yang dilaksanakan secara berkala / triwulan.

#### 1.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD

Target Kinerja Tahun 2022 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 25%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 25%

Pada kegiatan ini melaksanakan fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan yaitu dari jasa pelayanan pasar dan jasa pelayanan tera – tera ulang yang dilaksanakan secara berkala, baik bulanan, triwulan dan semester.

##### 1.4.1 Penetapan Wajib Retribusi Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah

Target Kinerja Tahun 2022 : 2 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 2 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 2 dokumen

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penerbitan SKR (Surat Ketetapan Retribusi) sesuai dengan ijin yang sudah disetujui dan STS Perijinan.

#### 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD

Target Kinerja Tahun 2022 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 3%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 32%

Pada kegiatan ini melaksanakan fasilitasi administrasi umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan/material, dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

##### 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan



Bangunan Kantor yang  
Disediakan

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 paket  
Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 paket  
Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 1 paket

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan komponen – komponen instalasi listrik yang dibutuhkan di kantor maupun di pasar.

#### 1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Bahan  
Logistik Kantor yang  
Disediakan

Target Kinerja Tahun 2022 : 5 paket  
Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 2 paket  
Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 1 paket

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan belanja alat – alat kebersihan, bahan pembersih, ATK, benda pos, dan peralatan kesehatan yang dibutuhkan di kantor maupun di pasar – pasar daerah.

#### 1.5.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Barang Cetakan  
dan Penggandaan yang  
Disediakan

Target Kinerja Tahun 2022 : 3 paket  
Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 1 paket  
Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 paket

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen yang dibutuhkan di kantor maupun di pasar – pasar daerah.

#### 1.5.4 Penyediaan Bahan/Material

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Bahan/Material  
yang Disediakan

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 paket  
Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 paket  
Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 paket



Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan bahan / material khususnya pada pengisian APAR yang akan ditempatkan di kantor maupun di pasar – pasar daerah.

#### 1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target Kinerja Tahun 2022 : 90 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 laporan

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 30 laporan

Pada sub kegiatan ini melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD berupa fasilitasi makan dan minum rapat, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.

#### 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor

Target Kinerja Tahun 2022 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 25%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 25%

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah kegiatan yang menunjang urusam penyediaan jasa operasional kantor.

##### 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target Kinerja Tahun 2022 : 12 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 3 laporan

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 3 laporan

Pada sub kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa pengiriman jasa paket, penggandaan surat dan Perjalanan dinas dalam daerah.

##### 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber



### Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Target Kinerja Tahun 2022 : 12 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 3 laporan

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 3 laporan

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan kegiatan belanja rutin untuk pembayaran tagihan rekening listrik, rekening air, rekening telepon, rekening internet untuk kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, kantor bidang metrologi legal dan pasar – pasar daerah.

#### 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Target Kinerja Tahun 2022 : 12 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 3 laporan

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 3 laporan

Pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum ini melaksanakan pembelanjaan untuk gaji tenaga kontak bulanan, pembayaran BPJS kesehatan, ketenagakerjaan dan kematian.

#### 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD

Target Kinerja Tahun 2022 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 24%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 24%

Pada Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

##### 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Kinerja : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



yang Dipelihara dan  
dibayarkan Pajaknya

Target Kinerja Tahun 2022 : 83 unit

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 2 unit

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 10 unit

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan.

#### 1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Kinerja : Jumlah Kendaraan  
Perorangan Dinas atau  
Kendaraan Dinas Jabatan  
yang Dipelihara dan  
dibayarkan Pajaknya

Target Kinerja Tahun 2022 : 134 unit

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 10 unit

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 36 unit

Pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ini merupakan pemeliharaan ac, server, computer, printer, dan laptop.

#### 1.7.3 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Indikator Kinerja : Jumlah Aset Tak Berwujud  
yang Dipelihara

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 unit

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 unit

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 unit

Pada sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud ini berupa Pengembangan Aplikasi SI DILAN yang dilaksanakan pad triwulan III.

Pada Program / kegiatan penunjang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan ini merupakan program dan kegiatan yang melekat pada sekretariat dan tidak mencapai capaian kinerja 100%, dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya dan penundaan kegiatan dikarenakan penggabungan OPD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang



Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dengan Dinas Koperasi UM digabung menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

## II. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Indikator Kinerja : Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Target Kinerja Tahun 2022 : 82%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 42,86%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0%

Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi Koperasi untuk mengawasi dan memeriksa Koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Indikator program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar 82%. Realisasi Kinerja Triwulan II adalah 0% sedangkan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 42,86% dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

### 2.1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja : Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi

Target Kinerja Tahun 2022 : 35 koperasi

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 15 koperasi

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 koperasi

Dilaksanakannya Pengawasan/Pemeriksaan Koperasi, diharapkan pengelolaan Koperasi di Kabupaten Lumajang bisa lebih baik, yang memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan seluruh anggota dan masyarakat pada umumnya. Realisasi Kinerja Triwulan



II Tahun 2022 masih 0 dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

#### 2.1.1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Target Kinerja Tahun 2022 : 35 koperasi

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 15 koperasi

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 koperasi

Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerpan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan koperasi dan penerapan sanksi. Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022 masih 0 dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

#### 2.1.2 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja

Target Kinerja Tahun 2022 : 35 koperasi

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 206 koperasi

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 65 koperasi

Pemeriksaan Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan





kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping tujuan tersebut, tujuan dari segi pemeriksaan Koperasi adalah untuk memperoleh data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka mengetahui kesesuaian praktik-praktik Pengelolaan Usaha Koperasi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Serta untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut terkait pembinaan dan/atau penerapan sanksi. Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022 sudah melebihi target kinerja tahun 2022 dikarenakan koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sejumlah 65 koperasi, dimana RAT merupakan bentuk kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang – undangan.

### III. Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi

Indikator Kinerja : Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat

Target Kinerja Tahun 2022 : 81%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 14,29%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 76%

Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah. Adapun kesehatan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Indikator Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi adalah Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat sebesar 81%. Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022 masih 76%.

#### 3.1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah koperasi simpan pinjam yang sehat

Target Kinerja Tahun 2022 : 70 koperasi

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 10 koperasi

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 53 koperasi

Dilaksanakannya penilaian kesehatan yang dilakukan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bahan evaluasi agar koperasi mampu meningkatkan performa dengan memperhatikan



aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi, serta penerapan prinsip syariah bagi KSPPS/USPPS. Selain itu, Penilaian Kesehatan Koperasi juga dapat meningkatkan kepercayaan diri koperasi. Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022 sebesar 53 koperasi.

### 3.1.1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan

Target Kinerja Tahun 2022 : 70 koperasi

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 10 koperasi

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 53 koperasi

Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dengan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota, calon anggota, ataupun koperasi lain, wajib mengelola usahanya secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, sehingga koperasi senantiasa dalam keadaan “sehat” sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberi manfaat kepada anggota dan masyarakat. Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022 sebesar 53 koperasi.

### 3.1.2 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan

Target Kinerja Tahun 2022 : 4 koperasi

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 koperasi

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 koperasi

Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota diberikan ke unit usaha koperasi yang telah dinilai kesehatannya. Hal ini sebagai apresiasi koperasi yang menjalankan prinsip-koperasi dengan benar dan memiliki pertumbuhan yang aman dan kontiniu sekaligus menjadi parameter baru bagi koperasi. Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022 masih 0 dikarenakan akan dilaksanakan pada



triwulan III pada bulan Juli bertepatan dengan Hari Koperasi yang ke-75.

#### IV. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Indikator Kinerja : Persentase Pendidikan Koperasi

Target Kinerja Tahun 2022 : 85%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 60%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 40%

Pendidikan dan latihan perkoperasian adalah salah satu jalan terbaik untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi dan meneguhkan keyakinan para anggota tentang besarnya manfaat yang diberikan oleh koperasi untuk meningkatkan taraf hidup anggota. Melalui pendidikan, anggota juga dipersiapkan dan dibentuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai-nilai, prinsip-prinsip dan praktik-praktik koperasi. Indikator Program ini adalah Persentase Pendidikan Koperasi sebesar 85%. Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022 sebesar 40%.

##### 4.1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian

Target Kinerja Tahun 2022 : 200 orang

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 120 orang

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 80 orang

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu unsur penting yang harus dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta wawasan dalam perkoperasian. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan anggota, pengurus, pengawas, atau karyawan dalam bidang pengetahuan perkoperasian, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kegiatan dan usaha. Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022 80 orang.

##### 5.1.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Indikator Kinerja : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian

Target Kinerja Tahun 2022 : 200 orang

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 120 orang



Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 80 orang

Pelatihan koperasi berorientasi pada kinerja, dengan maksud untuk memperbaiki keahlian pekerja sehingga dapat lebih mampu dalam menjalankan tupoksi pekerjaannya sehingga SDM pengelola koperasi memiliki kualitas yang baik, memiliki kemampuan manajemen yang baik serta berwawasan/pegetahuan luas. Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 80 orang yang memahami Pengetahuan Perkoperasian.

#### V. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Indikator Kinerja : Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Target Kinerja Tahun 2022 : 80%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0%

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan unit usaha lainnya. Indikator Program ini adalah Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar 80%. Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022 masih 0% dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan III.

#### 5.1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah koperasi yang mengikuti Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi

Target Kinerja Tahun 2022 : 200 orang

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 orang

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 orang

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan fasilitasi untuk



meningkatkan produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi. Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022 masih 0% dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan III.

5.1.1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan

Target Kinerja Tahun 2022 : 200 orang

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 orang

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 orang

Bentuk kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah pembinaan dan sosialisasi ke Badan Usaha Milik Pesantren (BUMTREN), dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang UKM dan kewirausahaan bagi SDM yang mengelola Badan Usaha Milik Pesantren (BUMTREN). Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022 masih 0 dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

VI. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Indikator Kinerja : Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro

Target Kinerja Tahun 2022 : 75%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0%

UMKM merupakan salah satu barometer perekonomian nasional. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Indikator Program ini adalah Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro sebesar 75%. Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022 masih 0 dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan III.



6.1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Indikator Kinerja : Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Usaha Mikro

Target Kinerja Tahun 2022 : 460 usaha mikro

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 usaha mikro

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 usaha mikro

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan merupakan fasilitas Pemberdayaan Usaha Mikro yang targetnya sebanyak 460 usaha mikro. Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022 masih 0 dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan III.

6.1.1 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Indikator Kinerja : Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha

Target Kinerja Tahun 2022 : 310 unit usaha

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 unit usaha

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 unit usaha

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Bentuk kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro adalah belanja dana hibah penguatan modal. Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022 masih 0 dikarenakan pada triwulan II masih proses pengajuan Telaah Staf ke Bupati dan akan dilaksanakan pada triwulan III.

VII. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja : Nilai retribusi pelayanan pasar

Target Kinerja Tahun 2022 : Rp 8.921.132.500

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : Rp 662.008.400 (Maret - Diskopindag)



Rp 1.954.265.750 (Januari s/d Maret)

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : Rp 1.734.134.320

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai indikator kinerja nilai retribusi pelayanan pasar dimana setoran retribusi ini merupakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang dari pemungutan retribusi pelayanan pasar. Adapun target nilai retribusi pelayanan pasar berdasarkan hasil KUA – PPAS tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 8.921.132.500. Realisasi Triwulan I Tahun 2022 (Maret 2022) sebesar Rp 662.008.400, sehingga capaian kinerja sebesar 24% terekap di LKJ Dinas Perdagangan Triwulan I dikarenakan penggabungan OPD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 13 tahun 2022. Sedangkan rekap realisasi Triwulan I (Januari-Maret) Rp 1.954.265.750 dan realisasi Triwulan II Rp 1.734.134.320 sehingga total capaian terhadap target tahun 2022 sebesar 41%.

#### 7.1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja :prosentase sarana yang dibangun/  
direhab

Target Kinerja Tahun 2022 : 16,67%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 %

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 %

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai indikator kinerja yaitu prosentase sarana yang dibangun/ direhab, belum ada pasar yang direhab/dipelihara karena masih dalam proses perencanaan sehingga realisasi terhadap target Triwulan II tahun 2022 adalah 0% dikarenakan masih proses perencanaan dan pembangunan.

##### 7.1.1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja :Jumlah Sarana Distribusi  
Perdagangan

Target Kinerja Tahun 2022 : 30 pasar

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 30 pasar

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 30 pasar

Salah satu pendukung meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan adalah Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan. Adapun jumlah sarana distribusi perdagangan sebanyak 30 pasar.



### 7.1.2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Target Kinerja Tahun 2022 : 30 pasar

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 30 pasar

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 30 pasar

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan pasar mempunyai indikator kinerja yaitu jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dimana realisasi pada Triwulan II Tahun 2022 adalah 30 pasar sehingga capaian terhadap target sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah 100%.

### 7.2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya

Indikator Kinerja : Jumlah pengelola pasar yang dibina

Target Kinerja Tahun 2022 : 64 orang

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 64 orang

Realisasi Kinerja Tw II 2022: 64 orang

Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya mempunyai indikator kinerja jumlah pengelola yang dibina yang lebih difokuskan ke petugas retribusi pasar dengan tujuan meningkatkan ketelitian dalam perhitungan kembali retribusi yang telah diterima sangat dibutuhkan. Karena seringkali terdapat uang yang sudah tidak layak beredar dalam penarikan retribusi, sehingga menimbulkan kerugian. Selain itu untuk menghindari pemungutan-pemungutan liar yang sering terjadi. Adapun pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 100% .

#### 7.2.1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Target Kinerja Tahun 2022 : 12 dokumen





Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 3 dokumen

Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan merupakan kegiatan monitoring benda berharga di pasar rakyat. Target kinerja pada 2022 yaitu 12 dokumen sedangkan realisasi kinerja pada Triwulan II yaitu 3 dokumen.

#### VIII. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Indikator Kinerja : Prosentase barang kebutuhan pokok yang harganya stabil

Target Kinerja Tahun 2022 : 80%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 93%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 89%

Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting merupakan kegiatan monitoring barang kebutuhan pokok yang harganya stabil yang dihitung berdasarkan koefisien harga antar waktu yaitu 27 komoditi antara lain :

- 1) Beras = 1%
- 2) Gula = 1,31%
- 3) Minyak goreng = 2,53%
- 4) Daging (sapi, ayam broiler dan ayam kampung) = 3,56%
- 5) Telur ayam = 2,38%
- 6) Susu (susu kental manis dan susu bubuk) = 5,73%
- 7) Jagung pipilan = 2,16%
- 8) Garam beryodium = 0%
- 9) Tepung terigu = 3,23%
- 10) Kacang Kedelai = 1,94%
- 11) Mie instan = 1,58%
- 12) Cabe = 26,07%
- 13) Bawang merah dan putih = 14,61%
- 14) Ikan asin teri = 0,60%
- 15) Kacang hijau = 1,88%
- 16) Kacang tanah = 1,02%
- 17) Ketela pohon = 1,83%
- 18) Sayur mayur = 14,02%
- 19) Semen = 0,39%



- 20) Ikan segar = 1,96%
- 21) Kayu balok meranti (4x10)= 0,83%
- 22) Papan meranti(4mx3cmx20mm) = 0,46%
- 23) Triplek (6mm) = 0%
- 24) Besi beton (sni murni) = 0,12%
- 25) Paku = 1,07%
- 26) Gas elpigi 3 kg = 0%
- 27) Pupuk = 0%

Berdasarkan perhitungan tersebut yang koefisien harga antar waktu dibawah 10% sejumlah 24 bahan pokok sedangkan 3 bahan pokok antara lain : cabai, bawang merah, dan sayur mayur khususnya tomat, koefisien harga antar waktu di atas sehingga dapat dikatakan 10% dikarenakan curah hujan yang tinggi sehingga para petani harus menanggung biaya lebih untuk membeli pupuk termasuk obat-obatan guna mengatasi cabai, bawang merah, dan sayur mayur agar tidak terserang hama dan jamur. Akan tetapi secara keseluruhan harga bahan pokok tergolong stabil sehingga realisasi kinerja triwulan II sebesar 89%.

#### 8.1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota

Indikator Kinerja : Jumlah harga barang kebutuhan pokok yang dikendalikan

Target Kinerja Tahun 2022 : 13 barang

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 13 barang

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 13 barang

Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota merupakan kegiatan pemantauan harga dan pasokan pangan bertujuan untuk tercapainya ketersediaan bahan pangan utama dengan harga yang stabil secara pemantauan langsung maupun yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan. Komoditi yang dipantau sejumlah 13 komoditi antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, jagung pipilan, tepung terigu, kacang kedelai, cabe, bawang merah, bawang putih, dan ikan segar. Adapun capaian kinerja pada Triwulan ini yaitu 100%.



8.1.1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Target Kinerja Tahun 2022 : 12 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 3 laporan

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 3 laporan

Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota merupakan kegiatan pemantauan harga dan pasokan pangan bertujuan untuk tercapainya ketersediaan bahan pangan utama dengan harga yang stabil dan tersedianya data panel/informasi harga dan pasokan pangan di tingkat produsen (penggilingan), pedagang grosir dan pedagang eceran secara berkala, data tersebut bisa digunakan sebagai indikator pengambilan kebijakan jika sewaktu-waktu ada ketidakstabilan harga dan pasokan pangan di pasar. Adapun capaian kinerja pada triwulan ini yaitu 3 laporan atau sebesar 25%.

8.1.2 Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Target Kinerja Tahun 2022 : 4 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 1 laporan

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 1 laporan



Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Sebab, seringkali ada kenaikan harga pada saat terutama pada saat Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan menjelang pergantian tahun. Sub kegiatan ini dilaksanakan dikarenakan harga bahan pokok dan bahan penting lainnya berupa minyak goreng mengalami kenaikan harga. Kenaikan minyak goreng bukan hanya terjadi di Indonesia. Penyebab kenaikan harga minyak goreng adalah meningkatnya harga minyak kelapa sawit mentah atau curde palm oil (CPO) dan kurangnya pasokan bahan baku minyak nabati dan lemak (oils & fats) global di pasar secara global akibat pandemi dan cuaca buruk. Capaian kinerja Triwulan II 2022 sebesar 25%.

## 8.2 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	:	Jumlah objek pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi
Target Kinerja Tahun 2022	:	164 kios
Realisasi Kinerja Tw I 2022	:	0 kios
Realisasi Kinerja Tw II 2022	:	42 kios

Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk terhadap standar mutu pupuk dan penggunaan nomor pendaftaran, pewadahan dan pelabelan apakah yang tercantum sesuai dengan yang telah didaftarkan di Kementerian Pertanian. Jumlah kios sebagai objek pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi pada Triwulan II adalah 42 kios. Sehingga capaian kinerjanya masih 26%.

### 8.2.1 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%
-------------------	---	---



Target Kinerja Tahun 2022 : 4 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 laporan

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 1 laporan

Pupuk selalu menjadi masalah krusial dalam usaha tani. Seringkali masalah kelangkaan menjadi momok menakutkan petani menjelang musim tanam. Karenanya, pengawasan harus terus diintensifkan agar pupuk subsidi tepat sasaran dan tepat waktu. Kegiatan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dilaksanakan Triwulan II dan triwulan IV sehingga capaian triwulan II sebesar 25%.

#### IX. Program Pengembangan Ekspor

Indikator Kinerja	:	- Nilai Ekspor
		- Nilai Perdagangan Antar Daerah
Target Kinerja Tahun 2022	:	- Rp. 950.000.000.000
		- Rp. 4.080.000.000.000
Realisasi Kinerja Tw I 2022	:	- Rp 52.892.457.640 (Maret)
		- Rp. 9.119.085.188 (Maret)
		- Rp 137.221.581.084 (Januari s/ d Maret)
		- Rp. 16.532.272.243 (Januari s/d Maret)
Realisasi Kinerja Tw II 2022	:	- Rp 73.806.518.520
		- Rp. 15.795.677.371

Ekspor dan impor merupakan kegiatan yang sangat penting bagi sebuah negara. Dari kegiatan ekspor dan impor sebuah negara akan memperoleh pendapatan. Hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan. Adapun rekapitulasi nilai ekspor dan nilai perdagangan antar daerah ini dapat terlihat pada triwulan II 2022 masing-masing sebesar Rp 73.806.518.520 dan Rp. 15.795.677.371, total nilai ekspor triwulan II lebih kecil dibandingkan dengan triwulan I dikarenakan berkurangnya permintaan pasokan dari industri pengolahan kayu, terutama industri panel dan *woodworking* yang sebagian besar bahan bakunya menggunakan kayu alam, mengingat produk ekspor Lumajang dominan yaitu komoditi olahan kayu.

#### 9.1 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



Indikator Kinerja : nilai omset promosi dagang  
Target Kinerja Tahun 2022 : Rp 200.000.000  
Realisasi Kinerja Tw I 2022 : Rp 0  
Realisasi Kinerja Tw II 2022 : Rp 128.000.000

Salah satu pendukung pertumbuhan nilai perdagangan daerah adalah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dimana indikator kinerja kegiatan ini nilai omset promosi dagang. Realisasi kinerja pada Triwulan II yaitu Rp 128.000.000 yaitu transaksi misi dagang yang telah dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung komoditi telur asin. Capaian kinerja triwulan II sebesar 64% belum memenuhi target dikarenakan promosi dagang nasional dan lokal akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya setelah ada undangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

#### 9.1.1 Pameran Dagang Nasional

Indikator Kinerja : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang  
Target Kinerja Tahun 2022 : 30 pelaku usaha  
Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 pelaku usaha  
Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 pelaku usaha

Pameran Dagang Nasional berupa pameran produk lokal yang diselenggarakan di tingkat nasional yaitu pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo yang dilaksanakan pada bulan Juli 2022. Sehingga capaian terhadap target 2022 masih 0%.

#### 9.1.2 Pameran Dagang Lokal

Indikator Kinerja : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal  
Target Kinerja Tahun 2022 : 30 pelaku usaha  
Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 pelaku usaha  
Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 pelaku usaha

Pameran Dagang Lokal berupa pameran produk lokal yang diselenggarakan di tingkat provinsi Jawa Timur antara lain pameran Jatim Fair 2022. Kegiatan ini diselenggarakan di Grand City Mall & Convex Surabaya pada bulan Oktober



2022. Ajang Jatim Fair merupakan sarana untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk unggulan kepada masyarakat. Selain itu juga untuk memotivasi promosi dan meningkatkan transaksi dagang selama dan sesudah pameran sebagai sarana tolak ukur daya saing produk IKM. Sehingga realisasi kinerja pada Triwulan II masih 0%.

#### 9.1.3 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

Indikator Kinerja : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan

Target Kinerja Tahun 2022 : 3 pelaku usaha

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 pelaku usaha

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 3 pelaku usaha

Misi dagang adalah kegiatan untuk memperluas pangsa pasar dalam negeri dengan cara mempertemukan antara para penjual dan pembeli potensial dari dua provinsi. Dengan adanya misi dagang, diharapkan hubungan antar pelaku usaha lintas provinsi semakin erat dan pertumbuhan ekonomi semakin naik. Pada tahun 2022 target misi dagang sebanyak 1 kali kegiatan yang telah dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kesempatan yang sama, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan juga turut mengikuti misi dagang dan terjadi proses transaksi sebesar Rp 128.000.000 untuk komoditi telur asin. Sehingga capaian kinerja pada Triwulan II masih 100%.

#### X. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Indikator Kinerja : Persentase tingkat kepatuhan wajib tera ulang

Target Kinerja Tahun 2022 : 82%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 8%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 12%

Salah satu pendukung meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan adalah program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan indikator kegiatannya adalah prosentase tingkat kepatuhan wajib tera ulang. Dimana persentase ini didapatkan dari jumlah Wajib Tera Ulang yang telah melaksanakan Tera / tera ulang dibagi dengan potensi Wajib



Tera Ulang Kabupaten Lumajang sebanyak 82%, sehingga realisasi Triwulan II sebesar 12%.

#### 10.1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Indikator Kinerja : Nilai retribusi pelayanan tera / tera ulang

Target Kinerja Tahun 2022 : Rp. 175.000.000

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : Rp 12.785.800 (Maret)  
Rp31.968.900 (Januari s/d Maret)

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : Rp 56.220.200

Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan indikator kegiatannya adalah Nilai retribusi pelayanan tera / tera ulang. Dimana capaian pada Triwulan II Rp 56.220.200 atau sebesar 32% dari target 2022.

##### 10.1.1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Indikator Kinerja : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang

Target Kinerja Tahun 2022 : 27.542 unit

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 1.346 unit (Maret)  
2.224 (Januari s/d Maret)

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 3.334 unit

Salah satu pendukung tercapainya pertumbuhan pasar tertib ukur adalah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan indikator jumlah UTTP yang di tera, tera ulang. Dimana capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2022 yaitu 3.334 unit.

##### 10.1.2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Indikator Kinerja : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina

Target Kinerja Tahun 2022 : 850 orang

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 83 orang (Maret)  
189 orang (Januari s/d Maret)

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 327 orang





Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal merupakan kegiatan pendukung dari program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dimana indikator kinerja yaitu Jumlah wajib tera ulang yang diberikan penyuluhan, dengan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2022 adalah 327 WTU dikarenakan jumlah objek pada sub kegiatan pengawasan/penyuluhan metrologi legal mengalami peningkatan yang mengindikasikan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pengawasan mandiri terhadap UTTP khususnya yang berada di pasar cukup tinggi.

#### XI. Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri

Indikator Kinerja : Prosentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah

Target Kinerja Tahun 2022 : 4%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0%

Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri mempunyai indikator prosentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah dengan target kinerja pertumbuhan sebesar 4% dari pertumbuhan nilai perdagangan daerah 2021 sebesar Rp 7.033.198.293.037. Realisasi kinerja kegiatan ini pada Triwulan II adalah 0% dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan hasil aktivitas produksi.

##### 11.1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator Kinerja : Nilai Perdagangan Daerah

Target Kinerja Tahun 2022 : Rp 7.280.000.000.000

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : Rp 0

Realisasi Kinerja Tw II 2022: Rp 0

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri mempunyai indikator nilai perdagangan daerah sebesar Rp 7.280.000.000.000. Penguatan daya saing industri dan pengamanan pasar produk dalam negeri sangat diperlukan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendongkrak penggunaan produk-produk dalam negeri, baik melalui program-program promosi seperti sosialisasi produk dalam negeri maupun pameran-pameran, serta mengajak



kepada semua pihak agar terus memberikan dukungan untuk meningkatkan daya saing melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dengan menjaga kualitas. Nilai perdagangan yang daerah triwulan II masih nihil dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan hasil aktivitas produksi sehingga capaian kinerja kegiatan Triwulan II adalah 0.

#### 11.1.1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja : Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Target Kinerja Tahun 2022 : 50 UMKM

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 UMKM

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 50 UMKM

Salah satu pendukung pertumbuhan nilai perdagangan daerah adalah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/ kota, berupa event Pasar Ramadhan yang telah dilaksanakan pada bulan Ramadhan (April). Sehingga realisasi kinerja 50 UMKM dengan capaian kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II sebesar 100%.

#### 11.1.2 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Indikator Kinerja : Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 dokumen

Sub Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan merupakan sub kegiatan baru di tahun 2022, bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini berupa pembuatan Website Pameran Virtual Produk Unggulan Daerah. Dengan adanya Pameran virtual pandemi covid-19 tidak akan menjadi penghalang



untuk tetap produktif. Pameran ini menjadikan *visitor*/pengunjung dapat menjelajah dan berinteraksi dengan dunia virtual untuk merasakan *experience* pameran seperti di dunia nyata. Pelaksanaan sub kegiatan ini pada triwulan berikutnya, sehingga capaian pada triwulan II masih 0%.

XII. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator Kinerja : Nilai produksi industri  
 Target Kinerja Tahun 2022 : Rp 1.339.000.000.000  
 Realisasi Kinerja Tw I 2022 : Rp 62.011.542.828 (Maret 2022)  
 Rp 153.753.853.327 (Januari s/d Maret)  
 Realisasi Kinerja Tw II 2022 : Rp 89.602.195.891

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator nilai produksi industri yaitu Rp 1.339.000.000.000. Realisasi kinerja Triwulan II sebesar Rp 89.602.195.891. Sehingga capaian kinerja triwulan II sebesar 7%.

12.1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah industri dalam rencana pembangunan kabupaten yang difasilitasi  
 Target Kinerja Tahun 2022 : 60 ikm  
 Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 ikm  
 Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 ikm

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mempunyai indikator kinerja jumlah industri dalam rencana pembangunan kabupaten yang difasilitasi tetapi capaian Triwulan II masih 0% dikarenakan akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

12.1.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja :Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri  
 Target Kinerja Tahun 2022 : 1 dokumen  
 Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 dokumen  
 Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 dokumen



Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mempunyai indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri sebanyak 1 dokumen tetapi pelaksanaan kajian Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya. sehingga capaian Triwulan II masih 0%.

#### 12.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Target Kinerja Tahun 2022 : 8 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 dokumen

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri merupakan kegiatan yang berupa Pelatihan Pemasaran online Kecamatan Lumajang, Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Tempurasari, dan Kecamatan Yosowilangun, Temu Dialog Investasi Kawasan Industri Hasil Tembakau, Kajian Masterplan DED, yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya, sehingga capaian triwulan II masih 0%.

#### 12.1.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 dokumen



Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri merupakan kegiatan yang berupa Bimtek Peningkatan Mutu Produk Tahu Tempe, yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya, sehingga capaian triwulan II masih 0%.

12.1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 dokumen

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat terkait Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM, Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha, Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standarisasi Produk Aneka Kripik Sentra Kec.Senduro dan Sentra Kec. Pasrujambe, Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standarisasi Produk Gula Kelapa Sentra Kec.Pasirian dan Sentra Kec. Candipuro, Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standarisasi Produk Kopi Bubuk Sentra Kec.Senduro dan Sentra Kec. Pasrujambe, Pendampingan Kemitraan yang Berorientasi Ekspor, Pendampingan Pengembangan Diversifikasi Produk Berbahan Baku Logam Sentra Kec. Tempeh, Pendampingan Produksi dan Akses Bahan Baku untuk Memenuhi Standar Kemitraan, Pengembangan Promosi Produk IKM untuk menjalin kemitraan (Kemitraan dengan Market place), Pengembangan Promosi Produk IKM untuk menjalin kemitraan (Temu Mitra), Pelatihan Kemasan, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga serta bantuan revitalisasi dapur bersih IKM,



pengembangan ekonomi masyarakat berupa bantuan kemasan produk IKM. Fasilitasi ini bertujuan untuk memacu daya saing industri kecil dan menengah (IKM) nasional agar semakin kompetitif di pasar domestik maupun global. Kemasan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai wadah tetapi juga harus mampu berfungsi sebagai sarana promosi yang berdaya jual. Belum ada realisasi kinerja pada Triwulan II Tahun 2022 sehingga capaian terhadap target tahun 2022 yaitu 0%.

### XIII. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota

Indikator Kinerja : Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh IUI

Target Kinerja Tahun 2022 : 85%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 25%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 25 %

Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota merupakan kegiatan memfasilitasi produk IKM untuk untuk mengantongi izin usaha. Kepemilikan izin usaha akan memberikan banyak manfaat untuk IKM. Di antaranya, mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan, mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah, dan menjadi nilai plus dari pada bisnis UKM lain yang tidak memiliki IUMK. Capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 25%.

#### 13.1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah rekomendasi perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI

Target Kinerja Tahun 2022 : 4 rekomendasi

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 1 rekomendasi

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 1 rekomendasi

Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang Industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru. Kegiatan ini mempunyai indikator kinerja jumlah rekomendasi



perolehan IUI sebanyak 4 rekomendasi. Realisasi kinerja pada Triwulan II adalah 1 rekomendasi.

13.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 1 dokumen

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik mempunyai indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS sebanyak 1 dokumen sedangkan capaian pada Triwulan II sebanyak 1 dokumen.



### 13.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 1 dokumen

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan mempunyai indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen, realisasi kinerja triwulan II sebanyak 1 dokumen.

#### XIV. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator Kinerja : Prosentase tingkat kepatuhan penyampaian data industri

Target Kinerja Tahun 2022 : 63%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 47%

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional adalah salah satu pendukung pencapaian PDRB sektor industri dimana mempunyai indikator kinerja prosentase tingkat kepatuhan





penyampaian data industri yaitu 63%. Sistem Informasi Industri Nasional bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Realisasi Triwulan II sebesar 47% dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha atas kewajiban menyampaikan data industri.

14.1 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen informasi industri yang tersedia

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 Dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 1 Dokumen

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota mempunyai indikator jumlah dokumen informasi industri yang tersedia sebanyak 1 dokumen. Realisasi kinerja triwulan II sebanyak 1 dokumen.

14.1.1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Indikator Kinerja :Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 Dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 1 Dokumen



Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota mempunyai indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Realisasi kinerja triwulan II sebanyak 1 dokumen.

Untuk mengetahui penyerapan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Triwulan II Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada table 3.3 sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Penyerapan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Triwulan II Tahun Anggaran 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase Penyerapan ANggaran (%)
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	10.443.538.120	3.398.043.811	(32,54%)
2	Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	12.368.300.000	10.200.000	(0,08%)
3	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	3.849.000.000	790.458.000	(20,54%)
4	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	6.602.922.184	20.722.150	(0,31%)
5	Meningkatnya pendapatan perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	371.262.000	143.228.200	(38,58%)

Dari tabel diatas menunjukkan dengan alokasi total pagu Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Rp 33.635.022.304,- terdiri dari sisa anggaran eks Dinas Perdagangan sebesar 18.124.301.502 sedangkan anggaran eks Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar 15.510.720.802 dengan rincian serapan anggaran Triwulan II Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sebesar Rp 4.362.652.161 atau 12,97%.

Untuk Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

Kabupaten Lumajang Triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat Tabel. 3.4 dibawah ini :

**Tabel 3.4 Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Triwulan II (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	Tidak dapat diukur karena menunggu release data BPS	32,54%	Tidak dapat diukur karena menunggu release data BPS
2.	Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	Tidak dapat diukur karena menunggu release data BPS	0,08%	
3.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Tidak dapat diukur karena menunggu release data BPS	20,54%	
4.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	Tidak dapat diukur karena menunggu release data BPS	0,31%	
5.	Meningkatnya pendapatan perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	Tidak dapat diukur karena menunggu release data BPS	38,58%	

Dari Tabel 3.4 diatas dapat diketahui bahwa capaian tingkat efisiensi belum dapat diukur dikarenakan capaian kinerja belum dapat diukur.

Dari Penjabaran diatas dapat diketahui hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja 2022 berdasarkan target indikator kinerja program Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi program yang belum memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan:
  1. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
  2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
  3. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
  
- b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan:
  1. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
  2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
  3. Program Pengembangan Ekspor



4. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
5. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
7. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
8. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
9. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
10. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
11. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Hasil evaluasi 14 program yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan disebabkan oleh :

1. Beberapa sub kegiatan / kegiatan pada program tersebut yang dijadwalkan pada triwulan berikutnya.
2. Penundaan pelaksanaan kegiatan serta penyesuaian terhadap program-program yang didanai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sesuai dengan PMK no 206 tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
3. Adanya Perubahan SOTK yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi UM digabung menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.

### **Analisis Tantangan serta Solusi Permasalahan**

Dalam pencapaian sasaran pembangunan tidak lepas dari berbagai tantangan khususnya pada bidang koperasi, bidang perdagangan dan metrologi legal, dan industri dan usaha mikro yaitu :

1. Kurangnya personil dalam pelaksanaan monitoring dan verifikasi lapangan.
2. Tidak sesuainya target indikator program, dikarenakan jumlah peserta pelatihan yang lebih besar daripada target yang telah ditetapkan.
3. Kurangnya koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat terkait pengendalian izin usaha serta sering berubahnya regulasi/peraturan terkait perizinan usaha.
4. Penundaan pelaksanaan kegiatan karena perubahan SOTK dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.



5. Kesadaran pelaku usaha atas kewajiban menyampaikan data industri masih sangat kurang

Dari tantangan diatas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang mengambil langkah - langkah kedepan untuk meminimalisir tantangan tersebut melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Personil cadangan untuk menggantikan personil yang berhalangan hadir karena benturan jadwal kegiatan
2. Penyesuaian target indikator program melalui pengajuan renja perubahan 2022 dan P-APBD
3. Sosialisasi regulasi/peraturan terbaru terkait izin usaha industri.
4. *Reschedule* pelaksanaan kegiatan. Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan
5. Pelaksanaan sosialisasi terkait pentingnya penyampaian data industri

#### **b. REALISASI ANGGARAN**

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan . Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dengan Bupati Lumajang. Untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan , maka pada tahun anggaran 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang mendapatkan alokasi anggaran setelah *perubahan SOTK* yaitu sebesar Rp. 33.635.022.304 yang digunakan untuk melaksanakan 14 program meliputi 22 kegiatan 48 sub kegiatan.

Berikut adalah anggaran yang merupakan tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan untuk mengelolanya secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI TRIWULAN II	CAPAIAN (%)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI</b>	10.443.538.120	3.398.043.811	32,54%
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	9.916.578.270	3.377.443.811	34,06%
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	7.591.250	1.170.500	15,42%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.330.000	1.170.500	35,15%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.190.000	0	0,00%
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	871.250	0	0,00%
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	0	0,00%
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	7.941.149.970	2.959.253.660	37,26%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.893.035.970	2.946.254.660	37,33%
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.330.000	12.999.000	30,00%
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4.784.000	0	0,00%
1.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	17.756.000	0	0,00%
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.756.000	0	0,00%
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.000.000	0	0,00%
1.4	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	5.000.000	0	0,00%
1.4.1	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	5.000.000	0	0,00%
1.5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	288.155.570	54.249.770	18,83%
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.020.090	7.013.250	99,90%
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.456.330	495.000	0,54%
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.275.550	0	0,00%
1.5.4	Penyediaan Bahan / Material	4.560.600	0	0,00%
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.843.000	46.741.520	36,28%
1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1.259.402.280	304.804.112	24,20%
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.035.000	572.000	18,85%



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI TRIWULAN II	CAPAIAN (%)
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	344.612.080	86.231.812	25,02%
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	911.755.200	218.000.300	23,91%
1.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	397.523.200	57.965.769	14,58%
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	277.473.200	49.110.769	17,70%
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.050.000	8.855.000	12,64%
1.7.3	Pemeliharaan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000		0,00%
II	<b>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b>	32.400.000	5.100.000	15,74%
2.1	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	32.400.000	5.100.000	15,74%
2.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	26.400.000	5.100.000	19,32%
2.1.2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.000.000	0	0,00%
III	<b>Program penilaian kesehatan ksp/usp Koperasi</b>	75.360.000	5.100.000	6,77%
3.1	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	75.360.000	5.100.000	6,77%
31.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	52.800.000	5.100.000	9,66%
3.1.2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	22.560.000	0	0,00%
IV	<b>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</b>	404.200.000	10.400.000	2,57%
4.1	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	404.200.000	10.400.000	2,57%
4.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	404.200.000	10.400.000	2,57%



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI TRIWULAN II	CAPAIAN (%)
V	<b>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</b>	14.999.850	0	0,00%
5.1	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	14.999.850	0	0,00%
5.1.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	14.999.850	0	0,00%
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN USAHA MIKRO</b>	12.368.300.00	10.200.000	0,08%
VI	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	12.368.300.00	10.200.000	0,08%
6.1	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	12.368.300.00	10.200.000	0,08%
6.1.1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	12.368.300.00	10.200.000	0,08%
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	4.220.262.000	933.686.200	22,12%
VII	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	3.682.000.000	778.964.000	21,16%
7.1	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	2.979.000.000	568.964.000	19,10%
7.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.655.000.000	175.364.000	10,60%
7.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.324.000.000	393.600.000	29,73%
7.2	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	703.000.000	210.000.000	29,87%
7.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	703.000.000	210.000.000	29,87%
VIII	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	37.690.000	900.000	2,39%
8.1	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	7.690.000	900.000	11,70%
81.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4.090.000	900.000	22,00%





NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI TRIWULAN II	CAPAIAN (%)
8.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3.600.000	0	0,00%
<b>8.2</b>	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	30.000.000	0	0,00%
8.2.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	30.000.000	0	0,00%
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	167.000.00	11.494.000	6,88%
<b>9.1</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	167.000.00	11.494.000	6,88%
9.1.1	Pameran Dagang Nasional	100.000.000	0	0,00%
9.1.2	Pameran Dagang Lokal	50.000.000	0	0,00%
9.1.3	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	17.000.000	11.494.000	67,61%
<b>X</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	163.572.000	40.025.000	24,47%
<b>10.1</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	163.572.000	40.025.000	24,47%
10.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	146.572.000	34.925.000	23,83%
10.1.2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	17.000.000	5.100.000	30,00%
<b>XI</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	170.000.000	102.303.200	60,18%
<b>11.1</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	170.000.000	102.303.200	60,18%
11.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	120.000.000	102.303.200	85,25%
11.1.2	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	50.000.000	0	0%
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>6.602.922.184</b>	0	0%
<b>XII</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	6.569.008.386	20.722.150	0,31%
<b>12.1</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	6.569.008.386	0	0,00%
12.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	75.000.000	0	0,00%
12.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	429.999.600	0	0,00%
12.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	27.000.000	0	0,00%



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI TRIWULAN II	CAPAIAN (%)
12.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6.037.008.786	0	0,00%
<b>XIII</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	25.433.798	15.418.150	60,62%
<b>13.1</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	25.433.798	15.418.150	60,62%
13.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.749.750	15.418.150	97,89%
13.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	9.684.048	0	0,00%
<b>XIV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	8.480.000	5.304.000	62,55%
<b>14.1</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	8.480.000	5.304.000	62,55%
14.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	8.480.000	5.304.000	62,55%
<b>JUMLAH</b>		<b>33.635.022.304</b>	4.362.652.161	12,97%



Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2022 dengan Anggaran Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	187.163.473.963	Belum dapat diukur menunggu release BPS	Belum dapat diukur	10.443.538.120	3.398.043.811	32,54	Belum dapat diukur
2	Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	10.386.052.733.457	Belum dapat diukur menunggu release BPS	Belum dapat diukur	12.368.300.000	10.200.000	0,08	Belum dapat diukur
3	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	3.354.259.412.080	Belum dapat diukur menunggu release BPS	Belum dapat diukur	3.849.000.000	790.458.000	20,54	Belum dapat diukur
4	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	4.838.025.215.520	Belum dapat diukur menunggu release BPS	Belum dapat diukur	6.602.922.184	20.722.150	0,31	Belum dapat diukur

5	Meningkatnya pendapatan perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	21.843.136,20	Belum dapat diukur menunggu release BPS	Belum dapat diukur	371.262.000	143.228.200	38,58	Belum dapat diukur
---	-----------------------------------	----------------------------	---------------	---	--------------------	-------------	-------------	-------	--------------------

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan II 2022



Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran pada tabel diatas ditetapkan untuk sasaran strategis kualitas Perdagangan masyarakat tingkat efisiensinya belum dapat diukur karena menunggu release data PDRB dari Badan Pusat Statistik. Adapun realisasi kinerja dan anggaran pada Triwulan II pada tahun 2022 adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI</b>	Nilai PDRB sektor Koperasi	187.163.473.963	Menunggu data BPS		10.443.538.120	3.398.043.811	32,54%
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100 %	27	27%	9.916.578.270	3.377.443.811	34,06%
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	19	19%	7.591.250	1.170.500	15,42%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	0	0%	3.330.000	1.170.500	35,15%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	0	0%	2.190.000	0	0,00%
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1	20%	871.250	0	0,00%
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	2	25%	1.200.000	0	0,00%
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	25	25%	7.941.149.970	2.959.253.660	37,26%



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 orang / 12 bulan	98	94%	7.893.035.970	2.946.254.660	37,33%
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	3	25%	43.330.000	12.999.000	30,00%
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3	25%	4.784.000	0	0,00%
1.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah</b>	100 %	14	14%	17.756.000	0	0,00%
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	0	0%	13.756.000	0	0,00%
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	1	25%	4.000.000	0	0,00%
1.4	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100 %	25	25%	5.000.000	0	0,00%
1.4.1	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penetapan wajib retribusi daerah	2 dokumen	2	100%	5.000.000	0	0,00%
1.5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD</b>	100 %	32	32%	288.155.570	54.249.770	18,83%
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1	100%	7.020.090	7.013.250	99,90%
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	1	20%	92.456.330	495.000	0,54%
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	3 paket	0	0%	55.275.550	0	0,00%



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Penggandaan yang Disediakan						
1.5.4	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	0	0%	4.560.600	0	0,00%
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan	30	33%	128.843.000	46.741.520	36,28%
1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	100 %	25	25%	1.259.402.280	304.804.112	24,20%
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3	25%	3.035.000	572.000	18,85%
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3	25%	344.612.080	86.231.812	25,02%
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3	25%	911.755.200	218.000.300	23,91%
1.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD</b>	100 %	24	24%	397.523.200	57.965.769	14,58%
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	83 unit	10	12%	277.473.200	49.110.769	17,70%
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134 unit	36	27%	70.050.000	8.855.000	12,64%
1.7.3	Pemeliharaan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	0	0%	50.000.000		0,00%
II	<b>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>Persentase Pengawasan dan</b>	82 %	0,00	0%	32.400.000	5.100.000	15,74%



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		<b>Pemeriksaan Koperasi</b>						
2.1	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi</b>	35 koperasi	0	0%	32.400.000	5.100.000	15,74%
2.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35 unit usaha	0	0%	26.400.000	5.100.000	19,32%
2.1.2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	35 unit usaha	65	186%	6.000.000	0	0,00%
III	<b>Program penilaian kesehatan ksp/usp Koperasi</b>	<b>Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat</b>	81 %	76	94%	75.360.000	5.100.000	6,77%
3.1	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah koperasi simpan pinjam yang sehat</b>	70 koperasi	53	76%	75.360.000	5.100.000	6,77%
3.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	70 unit usaha	53	76%	52.800.000	5.100.000	9,66%
3.1.2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	4 unit usaha	0	0%	22.560.000	0	0,00%
IV	<b>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>Persentase Pendidikan Koperasi</b>	85 %	40	47%	404.200.000	10.400.000	2,57%





No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.1	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian</b>	200 orang	80	40%	404.200.000	10.400.000	2,57%
4.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200 orang	80	40%	404.200.000	10.400.000	2,57%
V	<b>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	80 %	0	0%	14.999.850	0	0,00%
5.1	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah koperasi yang mengikuti Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi</b>	200 orang	0	0%	14.999.850	0	0,00%
5.1.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	200 orang	0	0%	14.999.850	0	0,00%
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN USAHA MIKRO</b>	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	10.386.052.733.457 rupiah	Menunggu data BPS	0%	12.368.300.000	10.200.000	0,08%
VI	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro</b>	75 %	0	0%	12.368.300.000	10.200.000	0,08%
6.1	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro</b>	460 usaha mikro	0	0%	12.368.300.000	10.200.000	0,08%



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	<b>Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>								
6.1.1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha	310	unit usaha	0	0%	12.368.300.000	10.200.000	0,08%
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	3.354.259.412.080	rupiah	Menunggu data BPS		3.849.000.000	790.458.000	21%
		Nilai Pendapatan Perkapita	21.843.136,20	rupiah	Menunggu data BPS		371.262.000	143.228.200	39%
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Nilai retribusi pelayanan pasar</b>	8.921.132.500	rupiah	1.734.134.320	19%	3.682.000.000	778.964.000	21,16%
7.1	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>prosentase sarana yang dibangun/di rehab</b>	16,67	%	0	0%	2.979.000.000	568.964.000	19,10%
7.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	30	pasar	30	100%	1.655.000.000	175.364.000	10,60%
7.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	30	pasar	30	100%	1.324.000.000	393.600.000	29,73%
7.2	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Jumlah Pengelola pasar yang dibina</b>	64	orang	64	100%	703.000.000	210.000.000	29,87%
7.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	dokumen	3	25%	703.000.000	210.000.000	29,87%
<b>VII I</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Prosentase barang kebutuhan pokok yang harganya stabil</b>	80	%	89	111%	37.690.000	900.000	2,39%
8.1	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah harga barang kebutuhan pokok yang dikendalikan</b>	13	barang	13	100%	7.690.000	900.000	11,70%
81.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah Laporan Pemantauan	12	laporan	3	25%	4.090.000	900.000	22,00%



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota						
8.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	4 laporan	1	25%	3.600.000	0	0%
8.2	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah objek pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi</b>	164 kios	42	26%	30.000.000	0	0%
8.2.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 laporan	1	25%	30.000.000	0	0%
IX	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Ekspor</li> <li>• Nilai Perdagangan Antar Daerah</li> </ul>	* 950.000.000 * 4.080.000.000	* 73.806.518.520 * 15.795.677.371	* 8% *0,4%	167.000.000	11.494.000	6,88%
9.1	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>nilai omset promosi dagang</b>	200.000.000	128.000.000	64%	167.000.000	11.494.000	6,88%
9.1.1	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	30 pelaku usaha	0	0%	100.000.000	0	0,00%
9.1.2	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran	30 pelaku usaha	0	0%	50.000.000	0	0,00%



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Dagang Lokal							
9.1.3	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3	pelaku usaha	3	100%	17.000.000	11.494.000	67,61%
<b>X</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Persentase tingkat kepatuhan wajib tera ulang</b>	82	%	12	15%	163.572.000	40.025.000	24,47%
10.1	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>Nilai retribusi pelayanan tera / tera ulang</b>	175.000.000	rupiah	56.220.200	32%	163.572.000	40.025.000	24,47%
10.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, TeraUlang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	27.542	unit	3.334	12%	146.572.000	34.925.000	23,83%
10.1.2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	850	orang	327	38%	17.000.000	5.100.000	30,00%
<b>XI</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Prosentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah</b>	4	%	0%	0%	170.000.000	102.303.200	60,18%
11.1	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Nilai Perdagangan Daerah</b>	7.280.000.000	rupiah	0	0%	170.000.000	102.303.200	60,18%
11.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50	UMKM	50	100%	120.000.000	102.303.200	85,25%
11.1.2	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1	Dokumen	0	0%	50.000.000	0	0%
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>Nilai PDRB Sektor Industri</b>	4.838.025.215	rupiah	Menunggu data BPS		<b>6.602.922.184</b>	0	0%



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
<b>XII</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Nilai produksi industri</b>	1.339.000.000.000	rupiah	89.602.195.891	7%	6.569.008.386	20.722.150	0,31%
<b>12.1</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah industry dalam rencana pembangunan kabupaten yang difasilitasi</b>	60	IKM	0	0%	6.569.008.386	0	0,00%
12.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	dokumen	0	0%	75.000.000	0	0,00%
12.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8	dokumen	0	0%	429.999.600	0	0,00%
12.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	dokumen	0	0%	27.000.000	0	0%
12.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	dokumen	0	0%	6.037.008.786	0	0%
<b>XIII</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh IUI</b>	85	%	25	29%	25.433.798	15.418.150	60,62%
<b>13.1</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rekomendasi perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI</b>	4	rekomendasi	1	25%	25.433.798	15.418.150	60,62%



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
13.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1	dokumen	1	100%	15.749.750	15.418.150	97,89%
13.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen	1	100%	9.684.048	0	0%
<b>XIV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Prosentase tingkat kepatuhan penyampaian data industri</b>	63	%	47	75%	8.480.000	5.304.000	62,55%
14.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi industri yang tersedia	1	dokumen	1	100%	8.480.000	5.304.000	62,55%



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
14. 1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	1	100%	8.480.000	5.304.000	62,55%
<b>JUMLAH</b>						<b>33.635.022.304</b>	4.362.652.161	12,97%



## BAB IV

### P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Triwulan II Tahun 2022. Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023. Obyektivitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka - angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana Strategis/RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2022 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada.

Pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Triwulan II Tahun 2022, yaitu nilai PDRB sektor perdagangan dan nilai PDRB sektor industri belum dapat diukur dikarenakan data tersebut menunggu release dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lumajang. Adapun pencapaian Kinerja dan anggaran per program / kegiatan kurang sesuai dengan *schedule* yang direncanakan dikarenakan perubahan SOTK yang menyebabkan *reschedule* pelaksanaan kegiatan.

Capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan masih perlu diambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja. Langkah tersebut antara lain dengan meningkatkan pertumbuhan ekspor dan nilai perdagangan daerah, memfasilitasi pelaku IKM agar produk IKM mampu berdaya saing sehingga dapat meningkatkan PDRB sektor perindustrian, meningkatkan pertumbuhan jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang, merehabilitasi sarana, dan prasarana perdagangan.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan laporan kinerja ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.